

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENILAI
EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KEMANDIRIAN DAN
PERTUMBUHAN BPKAD KABUPATEN
ELANGAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Akuntansi**

Disusun Oleh :

PUPUT TRI SANTIKA

NIM : 218.02.0033

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BINA INSAN
LUBUK LINGGAU
2022**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LEMBAR PENGESAHAN



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN MANAJEMEN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS,
EFISIENSI, KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN PADA BPKAD
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

Oleh :

Puput Tri Santika

NIM : 218.02.0033

Lubuklinggau, Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Yuli Nurhayati SE.,M.Si, Ak

Dian Wulan Sari, SE.,M.Ak

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bina Insan

Muhammad Yusuf, SE.,M.Si.,Ph.D

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : PUPUT TRI S
NIM : 218.02.0033
Judul : Analisis Kinerja Keuangan Untuk Menilai Efektivitas, Efisiensi,
Kemandirian dan Pertumbuhan Pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang

Komisi Penguji

1. Yuli Nurhayati SE.,M.Si, Ak (.....)
2. Dian Wulan Sari, SE.,M.Ak (.....)
3. Dewi Anggraini, SE.,M.Si (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bina Insan

Muhammad Yusuf, SE.,M.Si.,Ph.D

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
MOTTO DAN PERSEMBAHAN



MOTTO:

- *Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.*
- *Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan dan tidak ada kemudahan tanpa doa.*
- *Tidak ada kata menyerah untuk meraih impian.*

Persembahkan kepada :

- ❖ *Alm ayah dan ibunda tercinta yang telah berusaha membesarkan, mendidik, dan memberikan doa untuk keberhasilanku.*
- ❖ *Ayuk dan Kakakku tercinta*
- ❖ *Suamiku yang selalu menemani, membantu, memberi semangat dan motivasi untukku.*
- ❖ *Anakku tersayang khaira shabira*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan dan satu Almamaterku.*
- ❖

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PERNYATAAN



Saya yang bertanda tang PDF ah ini :

Nama Mahasiswa : Puput Tri Santika

NIM : 218.02.0033

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan Skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Universitas Bina Insan, merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Ada bagian tertentu dalam penulisan Skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

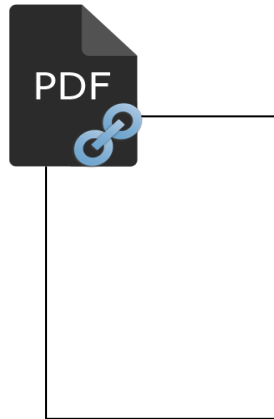
Lubuklinggau, Juli 2022

Penulis,

Puput Tri Santika

218.02.0033

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Puput Tri Santika
Tempat / Tanggal Lahir : Rantau Tenang, 19 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Rantau Tenang, Kec. Tebing Tinggi,
Kab. Empat Lawang.

Pendidikan

- SD : SD NEGERI 1 TEBING TINGGI
- SMP : SMP NEGERI 1 UNGGUL TEBING TINGGI
- SMA : SMA NEGERI 1 TEBING TINGGI

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRACT



Expenditure in the Budget Realization Report is an important component that invites public attention. This is because the community as funders through the local taxes they pay has an interest in knowing whether the funds have been used properly, efficiently, effectively, independently and for growth and oriented to the public interest. The purpose of this study is to determine and analyze the performance of the budget in the budget realization report at the Regional Financial and Asset Management Agency of Empat Lawang Regency from the 2017-2021 Fiscal Year. The data used is the Budget Realization Report and APBD at the Regional Financial and Asset Management Agency of Empat Lawang Regency for the 2017-2021 Fiscal Year.

From the results of the analysis consisting of an analysis of effectiveness, spending efficiency, independence and growth, it is found that the ratio of the effectiveness of spending at the Regional Financial and Asset Management Agency of Empat Lawang Regency in 2017-2021, is as follows 2017 of 82.93% (less effective), in 2018 it was 74.84% (ineffective), in 2019 it was 72.87% (ineffective), in 2020 it was 79.16% (ineffective), in 2021 it was 72.96% (less effective). And the efficiency ratio in 2016 was 98.21% (less efficient), 2017 was 97.74% (less efficient), 2018 was 96.90% (less efficient), 2019 was 98.25% (less efficient) , in 2020 it is 72.69% (efficient), in 2021 it is 80.78% (quite efficient). Meanwhile, the ratio of independence and growth of Empat Lawang Regency in 2017-2021 is as follows in 2017 of 10.43% (very low), in 2018 of 7.64% (very low), in 2019 of 6.91% (low once), in 2020 by 6.78% (very low), in 2021 by

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

11.86% (very low). And the growth ratio in 2017 was 26.59% (medium), 2018 was -53.17% (low) in 2019 was 11.86% (medium) in 2020 was -19.03% (low) and in 2021 was 65.06% (high)



Keywords: performance, budget, spending

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRAK



Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Merupakan Komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana melalui pajak daerah yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, mandiri dan pertumbuhan serta berorientasi pada kepentingan publik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dari Tahun Anggaran 2017-2021. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dan APBD pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017-2021.

Dari hasil analisis yang terdiri dari analisis efektifitas, efisiensi belanja, kemandirian dan pertumbuhan di dapatkan hasil bahwa rasio efektifitas belanja pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017-2021, adalah sebagai berikut 2017 sebesar 82,93% (kurang efektif), tahun 2018 sebesar 74,84% (tidak efektif), tahun 2019 sebesar 72,87% (tidak efektif), tahun 2020 sebesar 79,16% (tidak efektif), tahun 2021 sebesar 72,96% (kurang efektif). Dan rasio efisiensi tahun 2016 sebesar 98,21% (kurang efisien), tahun 2017 sebesar 97,74% (kurang efisien), tahun 2018 sebesar 96,90% (kurang efisien), tahun 2019 sebesar 98,25% (kurang efisien), tahun 2020 sebesar 72,69% (efisien), tahun 2021 sebesar 80,78% (cukup efisien).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Sedangkan pada rasio kemandirian dan pertumbuhan Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017-2021, adalah sebagai berikut 2017 sebesar 10,43% (rendah sekali), tahun 2018 sebesar 7,00% (rendah sekali), tahun 2019 sebesar 6,91% (rendah sekali), tahun 2020 sebesar 6,78% (rendah sekali), tahun 2021 sebesar 11,86% (rendah sekali). Dan rasio pertumbuhan tahun 2017 sebesar 26,59% (sedang), tahun 2018 sebesar -53,17% (rendah) tahun sebesar 2019 29,34% (sedang) tahun sebesar 2020 -19,03% (rendah) dan tahun 2021 sebesar 65,06% (tinggi).

Kata kunci : kinerja, anggaran, belanja

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan dengan baik skripsi ini yang berjudul “Analisis kinerja keuangan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang”

Dalam menyelesaikan laporan ini, peneliti banyak menerima bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materi dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Bapak Dr. H.Sardiyo, M.M selaku Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
2. Bapak Muhammad Akbar, S.T.,M.IT selaku Wakil Rektor I Universitas Lubuklinggau.
3. Bapak Wahid Nur Muklis, M.Pd selaku Wakil Rektor Universitas Lubuklinggau.
4. Bapak Muhammad Yusuf, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
5. Ibu Indrawati Mara Kesuma, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
6. Ibu Yuli Nurhayati, SE.,M.Si selaku pembimbing 1 yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Dian Wulan Sari, M.Ak selaku pembimbing 2 yang telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
9. Seluruh staf karyawan/karyawati Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
10. Orang tua penulis yaitu Bapak Alm. Aguscik dan Ibu Ita Hartati untuk setiap doa, cinta, kasih sayang, semangat dan semua pengorbanan mereka selama ini yang begitu besar, serta saudara dan saudari peneliti.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

11. Suamiku Yusuf Affan dan Anakku Khaira Shabira yang telah memberi semangat dan doa serta kasih, sayang yang begitu besar.
12. BPKAD Kabupaten Bawang yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melakukan penelitian tugas akhir.
13. Segenap rekan-rekan satu almamater di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Insan Lubuklinggau

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari segi materi, tata bahasa maupun penyusunan, untuk itu peneliti menerima dengan senang hati kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan nilai-nilai skripsi ini lebih baik lagi.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembacanya. Amin yarobbal'alamiin.

Lubuklinggau, Juli 2022

Peneliti,

Puput Tri Santika

Nim : 218.02.0033

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR ISI



	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Motto Dan Persembahan	iv
Halaman Pernyataan	v
Daftar Riwayat Hidup	vi
<i>Abstrak</i>	vii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
Daftar Lampiran	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian	5
1.2.1 Identifikasi Masalah	5
1.2.2 Fokus Penelitian	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Batasan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Literatur	9
2.1.1 Anggaran Sektor Publik	9
2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	12
2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	15
2.2.1 Pengertian APBD	15
2.2.2 Fungsi APBD	17
2.2.3 Tujuan APBD	18

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
2.2.5 Belanja Daerah	19
2.3 Laporan Realisasi Anggaran	19
2.3.1 Pengertian Laporan Anggaran Publik	19
2.3.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Publik	20
2.3.3 Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik	21
2.4 Analisis Rasio Keuangan	22
2.4.1 Pengertian Analisis rasio keuangan	22
2.4.2 Jenis - Jenis Rasio Keuangan	23
2.5 Penelitian yang Relevan	28
2.6 Kerangka Berpikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.1.1 Tempat Penelitian	32
3.1.2 Waktu Penelitian	32
3.2 Desain Penelitian	33
3.3 Definisi Operasional	34
3.4 Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan data	36
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Hasil Penelitian	38
4.1.1 Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Empat Lawang	38
4.1.2 Struktur organisasi BPKAD Kabupaten Empat Lawang	39
4.1.3 Tugas dan Wewenang	41
4.1.4 Analisis Tingkat Efektivitas	49
4.1.5 Analisis Tingkat Efisiensi	53
4.1.6 Analisis Tingkat Kemandirian	56
4.1.7 Analisis Tingkat Pertumbuhan	59
4.2 Pembahasan	62
4.2.1 Efektivitas Anggaran Belanja	62
4.2.2 Efisiensi Anggaran Belanja	63
4.2.3 Kemandirian Keuangan	66
4.2.4 Pertumbuhan PAD	68

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR TABEL



	Halaman
Tabel 1 Persentase Efektivitas Kinerja	25
Tabel 2 Penelitian yang Relevan	28
Tabel 3 Matrik Kegiatan	33
Tabel 4 Realisasi anggaran belanja	50
Tabel 5 Realisasi anggaran belanja langsung & total realisasi anggaran belanja ..	53
Tabel 6 PAD dan Bantuan pusat	56
Tabel 7 Realisasi PAD t dan Realisasi PAD t-1	59
Tabel 8 Tingkat Efektivitas	62
Tabel 9 Tingkat Efisiensi	64
Tabel 10 Tingkat Kemandirian	66
Tabel 11 Tingkat Pertumbuhan	68

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR GAMBAR



Halaman

Gambar 1 Kerangka Penelitian	31
Gambar 2 Desain Penelitian.....	34
Gambar 3 Sruktur Organisasi BPKAD	40
Gambar 4.1 Grafik Rasio Efektifitas.....	63
Gambar 4.2 Grafik Rasio Efisiensi	65
Gambar 4.3 Grafik Rasio Kemandirian	67
Gambar 4.4 Grafik Rasio Pertumbuhan.....	69

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar Pengajuan Judul
2. Kartu Bimbingan
3. Surat Penelitian
4. Laporan Realisasi Anggaran dan APBD
5. Wawancara



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB I



1.1 Latar Belakang

Anggaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan Anggaran adalah Rencana keuangan terperinci dan terkoordinasi mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, sebagai sarana untuk sasaran suatu rencana kerja (*budget*).

Realisasi anggaran digunakan untuk memberikan informasi. Maka dapat dikatakan bahwa realisasi merupakan kinerja atau hasil dari kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Nordiawan, 2010, p. 115) Realisasi Anggaran adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.

Efisiensi dan efektivitas sangat penting dalam pengukuran atau perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan serta terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efisiensi terkait dengan hubungan antara *output* berupa

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* (Mahmudi, 2011, p. 22). Efektivitas adalah hubungan antara *output* dan *input* atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Keefektifan (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan (Beni, 2016, p. 69).

Kemandirian bertujuan untuk menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2007, p. 233). Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya didalam industri dan perkembangan ekonomi secara umum (Fahmi, 2014, p. 82).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang secara kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati Empat Lawang di bidang Pengelola keuangan dan Aset Daerah yang dituangkan dalam perencanaan strategis organisasi melalui visi, misi dan tujuan jangka Panjang 2018-2023 serta sasaran jangka pendek mencakup kebijakan, program dan kegiatan. Tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah Membantu Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan pada Badan BPKAD Kabupaten Empat Lawang lebih ditekankan pada

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

penilaian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat setiap tahun anggaran. Penilaian kinerja melalui LAKIP hanya bertumpu pada *output* yang diperoleh oleh Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dengan membandingkan rencana yang ingin dicapai tanpa memperhatikan *outcome*. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi publik tersebut. Mengacu pada LKJIP BPKAD Empat lawang, Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Khususnya tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Empat lawang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis internal, eksternal, peluang dan kendala. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh kepada pencapaian target kegiatan pada BPKAD Kabupaten Empat lawang.

Setelah dilakukan observasi dan wawancara pada BPKAD Empat Lawang, dalam proses pencapaian kinerja keuangan terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, baik yang terkait dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun keuangan. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 50% salah satunya rekening kegiatan Pemeliharaan dan perawatan Aplikasi Keuangan Daerah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), dengan pagu anggaran sebesar Rp.217.156.015 dan realisasi sebesar Rp.87.107.000 (40,11%), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk selanjutnya ditambahkan pada anggaran tahun berikutnya. Hal ini

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang yang masih belum selesai, sehingga masih banyak hal-hal yang seharusnya diperbaiki serta dilanjutkan sebagai program kerja yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang diatas, Analisis kinerja keuangan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan kegiatan BPKAD Kabupaten Empat Lawang dalam bidang keuangan dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **"Analisis Kinerja Keuangan Untuk Menilai Efektifitas, Efisiensi, Kemandirian dan Pertumbuhan Kinerja Pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang"**

1.2. Identifikasi Masalah dan Fokus Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah yang ada sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan daerah belum berjalan dengan baik seperti rekening kegiatan pemeliharaan dan perawatan Aplikasi Keuangan Daerah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).
2. Anggaran belanja yang belum sesuai dengan target yang direncanakan

1.2.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini dengan fokus penelitian pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP BPKAD, 2020, p. 2) pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1.3 Rumusan Masalah



Adapun rumusan masalah penelitian ini membahas tentang:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah dilihat dari perhitungan rasio efektifitas pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah dilihat dari perhitungan rasio efisiensi pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah dilihat dari perhitungan rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah dilihat dari perhitungan rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang?

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, terdapat banyak faktor untuk menilai efektivitas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan kinerja yang ada di suatu instansi diantaranya faktor sarana dan prasarana dan Faktor Keuangan (laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP BPKAD, 2020). Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan menjadi lebih terarah, maka peneliti membatasi pada analisis kinerja keuangan berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan  yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio efektivitas pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio efisien pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kinerja keuangan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang.

2. Bagi Universitas

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, perbendaharaan bacaan di perpustakaan dan menambah wawasan mahasiswa ekonomi pada umumnya dan selanjutnya.



3. Bagi Instansi

diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan pertimbangan yang bermanfaat untuk penganggaran kedepannya.

4. Bagi Peneliti lain

diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan memasukan hal positif.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB II

KATA PENGANTAR



2.1 Literatur

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus di informasikan kepada publik untuk di kritik, di diskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada sektor publik sebagai alat penuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya, baik itu keuangan atau sebaliknya.

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu bangsa. Kegagalan pada sektor publik dapat berdampak pada terganggunya sektor bisnis dan sosial yang dapat memicu kondisi krisis suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sektor publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh diabaikan.

Menurut Nafarin (2012) Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas.

Penganggaran sektor terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter.

Pada sektor publik, anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.


Anggaran sebagai salah satu alat bantu manajemen memegang peranan penting karena dengan anggaran manajemen dapat merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi jalannya suatu kegiatan. Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang (Nafarin, 2012). Sedangkan pengertian anggaran menurut "Commite on Governmental Accounting" yang dikutip oleh Haruman (2010, p. 6) anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Bastian (2010, p. 166) Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- b. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satuan atau beberapa tahun.
- c. Anggaran berisi  atau kesanggupan manajemen, untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- d. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
- e. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

Menurut Mardiasmo (2009, p. 67) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Sedangkan menurut Tanjung (2006, p. 81) Anggaran pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Dari beberapa pengertian mengenai anggaran sektor publik yang telah dikemukakan oleh para ahli, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa anggaran adalah tindakan yang akan dilaksanakan oleh organisasi sektor publik menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang.

2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

a. Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*), anggaran sektor publik digunakan untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.



Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan,
 - 2) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya,
 - 3) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun,
 - 4) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- b. Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*), sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
- 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan,

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- 2) Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*),
 - 3) Menemukan pe...ng dapat dikendalikan (*controllable*) dan tak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians,
 - 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
- c. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*), anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*), anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sector publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.
- e. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*), setiap unit kerja pemerintahan terlibat



Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar lembaga dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

- f. Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*), anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.
- g. Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*), anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable* maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
- h. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Share*) Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.2.1 Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana penerimaan dan pengeluaran daerah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, bagi hasil, cadangan, dan pembiayaan yang disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003, pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Menurut Mahsun (2016, p. 81), Definisi anggaran pendapatan dan belanja daerah juga merupakan daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran belanja daerah selama satu tahun. APBD merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu tahun anggaran (Halim, 2012).

Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut.

Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

APBD terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, pendapatan terdiri atas Pajak Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, kemudian pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.2 Fungsi APBD

Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu:

1. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Protected by PDF Anti-Copy Free

[\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.2.3 Tujuan APBD


Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

2.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 pendapatan Daerah, adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor. 32 tahun 2004, terdiri dari:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Pendapatan Asli daerah (PAD), berasal dari: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan lain -  Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Dana Perimbangan, merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain - lain pendapatan daerah yang sah adalah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana Perimbangan meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

2.2.5 Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

2.3 Laporan Realisasi Anggaran Publik

2.3.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik

Laporan realisasi anggaran yang disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka - angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2 Tujuan laporan realisasi anggaran publik

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang undangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga memprediksi resiko ketidakpastian dari sumber-sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :

- a. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat.
- b. Telah sesuai dengan anggarannya.
- c. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3 Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik

a. Pendapatan LRA

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat notonya namun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

b. Belanja

Belanja adalah pengalokasian ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang diregistrasikan dalam dokumen otoritas kredit anggaran (*allotment*). Belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pembayaran diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari-hari kantor. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap. Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama.

c. Surplus / Defisit - LRA

Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit -LRA. Perhitungan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

surplus/defisit-LRA dilakukan di tingkat pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutupian yang dilakukan proses konsolidasi.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun bertahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran publik terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi publik, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

e. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2.4 Analisis rasio keuangan

2.4.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan

Analisis Rasio keuangan adalah kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya.

Menurut James C Van Horne (Kasmir, 2008, p. 1040) menyatakan bahwa “rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.” Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan.

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perbandingan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah dengan jumlah yang lain dan dengan menggunakan alat analisa, berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila rasio angka tersebut dibandingkan dengan angka rasio perbandingan yang digunakan sebagai standar”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan adalah perhitungan angka-angka dan perbandingan perhitungan dengan jumlah yang diakumulasi kemudian hasil akhir dijadikan alat evaluasi bagi suatu perusahaan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2.4.2 Jenis - Jenis rasio keuangan

a. Rasio Efektivitas



Efektivitas kinerja pada sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan outputnya (*cost of outcome*).

Menurut Mahmudi (2011, p. 22) efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran aktif kebijakan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dan keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pengukuran efektivitas bisa dilakukan hanya dengan mengukur *outcome*. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan target dengan anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi belanja induk}}{\text{Pagu anggaran induk}} \times 100\%$$



Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi persentase maka semakin efektivitas kerjanya. Secara umum, nilai efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Table 1. Persentase Efektivitas Kinerja

No	Tingkat Efektivitas	Persentase
1	Sangat efektif	>100%
2	Efektif	100%
3	Cukup Efektif	80%-99%
4	Kurang Efektif	60%-79%
5	Tidak Efektif	<60%

Sumber: Mahmudi (2013, p. 141)

b. Rasio Efisiensi

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif. Menurut Rahardjo (2011, p. 169) mengemukakan bahwa efisiensi merupakan suatu kondisi atau keadaan, dimana penyelesaian suatu pekerjaan dilaksanakan dengan benar dan dengan penuh kemampuan yang dimiliki. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input* atau dengan istilah lain *output per unit input*. Efisiensi

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu.

Rasio efisiensi belanja dapat diartikan sebagai berikut.



$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja}}{\text{Anggaran belanja kegiatan}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kitahanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah relatif lebih efisien dibandingkan tahun lalu, unit kerja A lebih efisien dibandingkan unit kerja B. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

c. Rasio Kemandirian

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan masyarakat daerahnya (Halim, 2008, p. 232). Rasio kemandirian keuangan daerah diukur menggunakan:

$$\text{KKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat atau Provinsi}} \times 100\%$$

growth Ratio

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dengan kriteria sebagai berikut:

Rendah sekali : 0%-25%

Rendah : 25%-50%

Sedang : 50%-75%

Tinggi : 75%-100%



d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan () mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan.

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{RpX_n - RpX_{n-1}}{RpX_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$RpX_n - X_{n-1}$: Realisasi belanja tahun yang dikurangi tahun sebelumnya.

RpX_{n-1} : Realisasi belanja penerimaan tahun sebelumnya.

Dengan kriteria sebagai berikut:

Rendah : 0% - 25%

Sedang : 25% - 50%

Tinggi : 50% - 100%

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2.5 Penelitian yang Relevan

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan rasio efektivitas, rasio efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya, Menurut Abdurahmat (2003, p. 92) Rasio efisiensi dapat mengukur tingkat belanja keuangan daerah mengalami fluktuasi atau meningkat, Menurut Rahardjo (2011, p. 169) Rasio kemandirian dapat menunjukan PAD daerah mencukupi atau tidak dalam pembiayaan pemerintah daerah itu sendiri, (Halim, 2008) rasio pertumbuhan mengukur seberapa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai di periode ke periode berikutnya. Hasil penelitian ini telah banyak mengalami perkembangan dan sejalan dengan yang akan diteliti dari berbagai penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang relevan dan biasanya digunakan untuk membandingkan antara penelitian yang dibuat dengan penelitian orang lain. Penelitian tentang kinerja keuangan telah banyak mengalami perkembangan Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dan efektifitas dan efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan kinerja. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, ada faktor-faktor yang berpengaruh positif namun ada juga yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan sebagai:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Tabel 2

Penelitian yang Relevan				
No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Andira (2018)	Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang.	Kuantitatif	Hasil penelitian yang menggunakan rasio likuiditas pada tahun 2013-2017 yaitu pada tahun 2014, kenaikan yang disebabkan oleh persediaan dan juga disebabkan karena yang jangka pendek sudah terbayarkan meskipun tidak dibayar keseluruhan.
2	Putri (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.	Kuantitatif deskriptif	Kinerja keuangan daerah pemerintah kabupaten Serang tahun 2010-2016 berdasarkan rasio derajat desentralisasi masuk kategori sangat rendah. rasio kemandirian daerah mengalami tingkat kemandirian yang sangat kurang, rasio efisiensi belanja keuangan daerah, mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
3	Zuhri Soleh (2016)	& Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.	Kuantitatif	Rasio kemandirian daerah kabupaten Kaur tergolong rendah sekali. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kaur tahun 2011,2013 dan 2014 berjalan kurang efektif namun pada tahun 2012 berjalan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



sangat efektif. Rasio belanja operasi baik sedangkan rasio belanja modal tidak baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaur meningkat dari tahun ke tahun.

- | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| 4 | Wonda (2016) | <i>Analysis of financial performances during local government district autonomy nabirie papua</i> | Kuantitatif | <p>1. <i>The ratio of regional financial independence in Nabire Regency has decreased and increased.</i></p> <p>2. <i>Effectiveness Ratio, collection of Regional Original Revenue (PAD) in Nabire Regency for the 2011-2013 fiscal year is good because the percentage obtained from the effectiveness ratio of Nabire Regency's Original Regional Revenue (PAD) exceeds one or 100%.</i></p> <p>3. <i>presentation obtained from the efficiency ratio exceeds 100%, while the performance of the local government is said to be efficient if the ratio achieved is less than one or below 100.</i></p> |
| 5 | Kartika & Kusuma (2015) | <i>An analysis of independency ratio, local revenue effectiveness ratio,</i> | <i>Descriptive statictical</i> | <i>The results showed that financial independency of sukabumi regency for</i> |
-

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

and local revenue
efficiency of the
budget performance
report in
Regency.



fiscal year of 2009-2013 were classified as very low by showing the pattern of relationships instructive. Local revenue effectiveness is classified as very effective. Sukabumi financial performance of 2009-2013 fiscal year by local revenue efficiency ratio as very efficient.

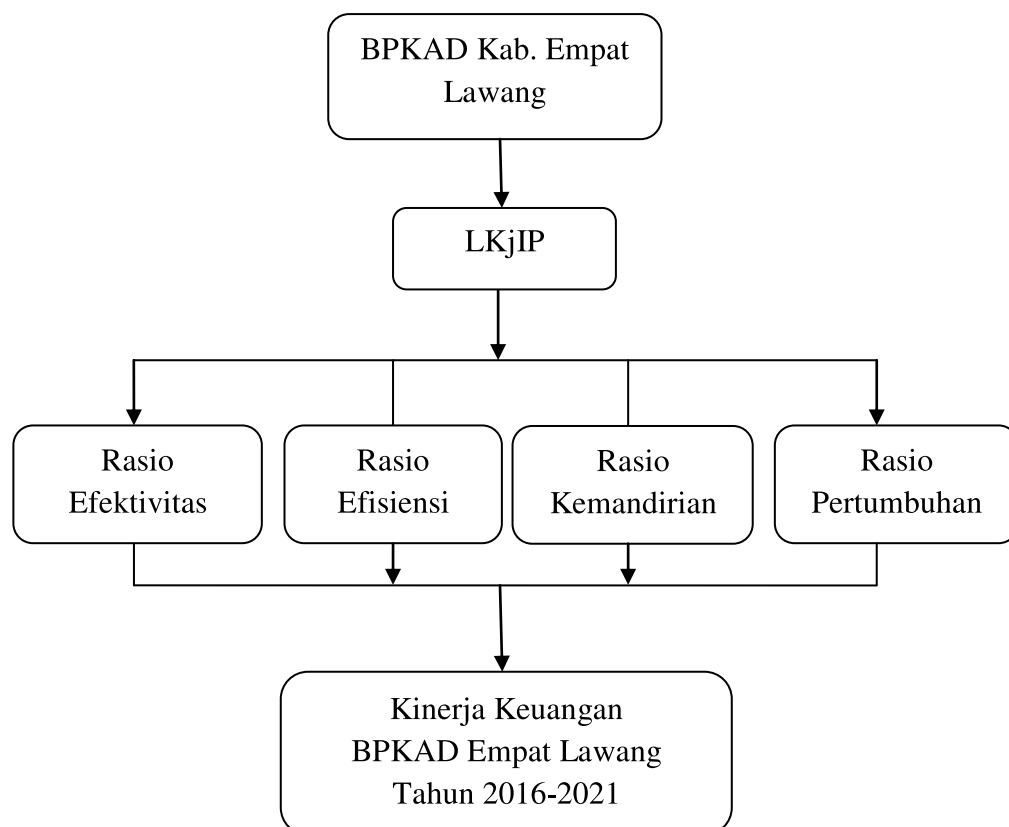
Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2.6 Kerangka Berpikir

Dari gambar 1 kerangka berpikir di bawah, untuk menentukan tingkat efektifitas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan kinerja data dilakukan dari pengumpulan data dari BPKAD Kabupaten Empat Lawang yaitu berupa data APBD dibandingkan dengan realisasi anggaran. Dari perbandingan tersebut baru dapat disimpulkan tingkat efektifitas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan kinerja dari Badan BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

Adapun kerangka penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1
Kerangka Berpikir



3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang.

3.1.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, mulai bulan Januari hingga juli 2022, berikut ini matrik kegiatan:

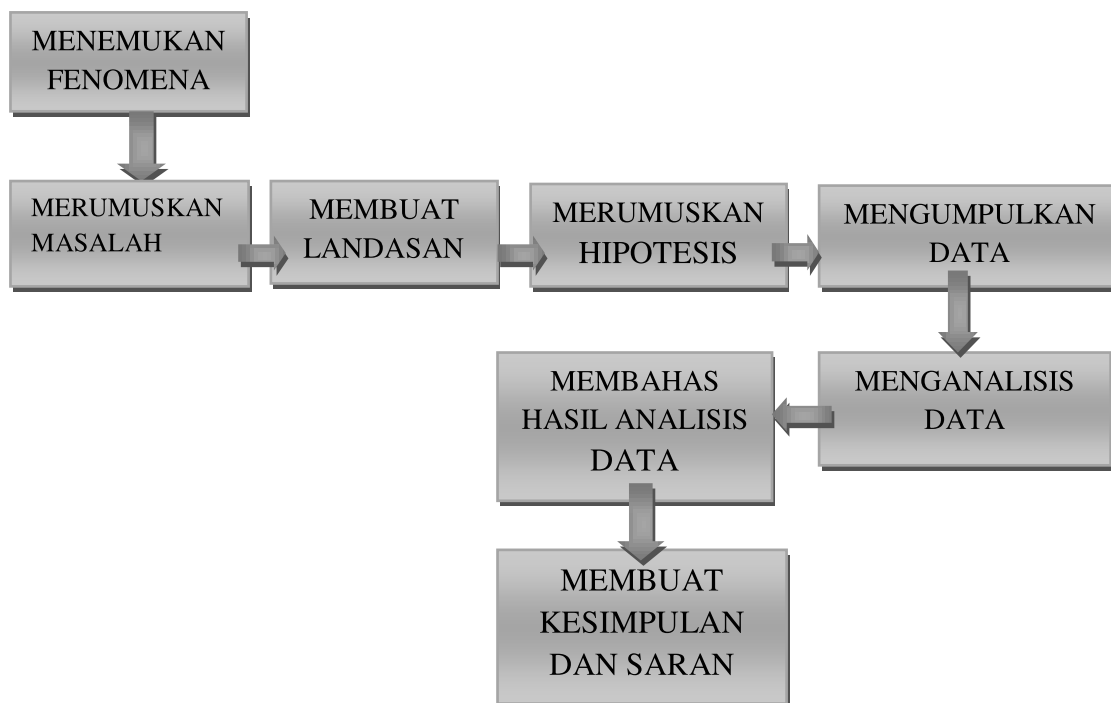
Tabel 3
Matrik Kegiatan

No	Kegiatan	Tahun 2022					
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul	■					
2	Pembuatan Proposal		■				
3	Pengajuan dan Perbaikan Proposal		■				
4	Seminar			■			
5	Pengumpulan Data			■			
6	Pengelolaan Data				■		
7	Pengajuan Bab I,II,III				■		
8	Perbaikan Bab I,II,III					■	
9	Pengajuan Bab IV,V,VI					■	
10	Perbaikan Bab VI,V,VI						■
11	Ujian Skripsi						■

3.2 Desain Penelitian **Protected by PDF Anti-Copy Free**

Penelitian ini merupakan penelitian **Protected by PDF Anti-Copy Free** deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif selama lima tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Belanja operasi, Belanja modal, Belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah

Adapun desain penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2
Desain penelitian

Protected by PDF Anti-Copy Free

3.3 Sumber Data [\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

Menurut Sugiyono (2016, p. 19) penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif karena dinyatakan dengan angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang mewakilinya.



Adapun sumber data terbagi menjadi 2(dua) yaitu :

- a. Data Primer. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
- b. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang bersumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari data tertulis seperti gambaran umum, struktur kerja, visi dan misi serta laporan realisasi anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD) pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

Protected by PDF Anti-Copy Free

3.4 Teknik Pengumpulan data [\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

Menurut Sujarweni (2015, p. 74) teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan dan menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian.



1. wawancara dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Arikunto (2013, p. 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari kepala bidang perbendaharaan BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
2. Observasi adalah teknik cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 2003, p. 175). Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
3. Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari laporan realisasi anggaran dan APBD BPKAD Empat Lawang.

Protected by PDF Anti-Copy Free

3.5 Teknik Analisis Data [\(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark\)](#)

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan teknik analisis data yang sesuai dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif berupa analisis kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Empat Lawang dalam lima tahun terakhir yakni Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Analisis data merupakan proses penelitian yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Analisis data dapat dilakukan setelah peneliti memperoleh data-data sebagai hasil penelitian. Untuk memastikan bahwa data-data tersebut dapat memenuhi persyaratan analisis, maka peneliti terlebih dahulu melakukan analisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang disajikan dalam bentuk rumus digunakan untuk memaparkan karakteristik data hasil penelitian serta menjawab permasalahan. Analisis data dilakukan dengan tahapan:

- a. Mengambil data yang terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Empat Lawang dalam lima tahun terakhir yakni Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
- b. Menganalisis masing-masing data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan analisis pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.
- c. Menghitung rasio keuangan dari Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2017-2021.
- d. Penarikan kesimpulan setelah menjabarkan berbagai data yang telah diperoleh, peneliti membuat kesimpulan yang merupakan hasil dari suatu penelitian.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN



4.1 Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah singkat BPKAD Kabupaten Empat Lawang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu Lembaga yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Permendagri nomor 41 tahun 2001 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah bahwa khusus Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pengelola keuangan dan aset daerah menjadi biro keuangan dan biro perlengkapan pada bagian selanjutnya pada permendagri nomor 41 tahun 2007 dijelaskan bahwa dinas daerah yang harus dibentuk yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kabupaten Empat Lawang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Tebing Tinggi. Kabupaten Empat Lawang diresmikan pada 20 April 2007 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR dengan disetujuinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Empat Lawang Rancangan Undang-Undangnya pada 8 Desember 2006 tentang pembentukan kabupaten Empat Lawang bersama 15 kabupaten/kota

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

baru lainnya. Kabupaten Empat Lawang merupakan pemekaran dari kabupaten Lahat.

4.1.2 Struktur organisasi Kabupaten Empat Lawang



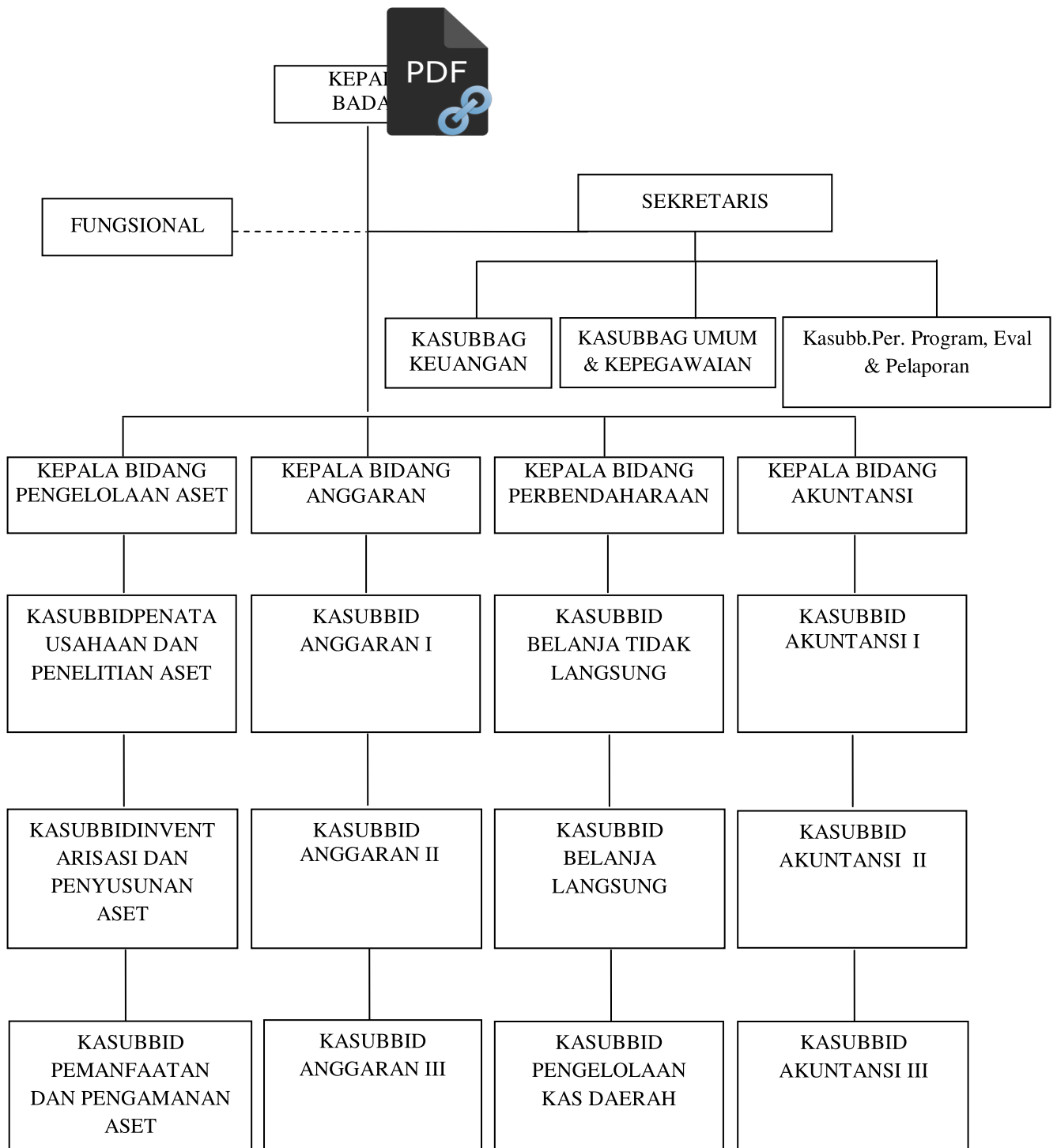
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 06 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Nomor 03 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang secara kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Bupati Empat Lawang di bidang pengelola keuangan dan aset daerah yang di tuangkan dalam perencanaan strategis organisasi melalui visi, misi dan tujuan jangka Panjang 2018-2023 serta sasaran jangka pendek mencakup kebijakan, program dan kegiatan.

Tugas pokok dan fungsi Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah membantu Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
Gambar 3 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Empat Lawang



Sumber : Arsip Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Empat Lawang

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.1.3 Tugas dan wewenang BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

Tugas dan wewenang setiap bagian adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan anggaran di bidang-bidang;
 - b. Mengkoordinir/mengkoordinasikan pengumpulan kebutuhan bahan kegiatan dari bidang-bidang;
 - c. Menyiapkan pelaksanaan petunjuk teknis pengajuan kegiatan bidang-bidang;
 - d. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA dan DPA antar bidang;
 - e. Melaksanakan penyempurnaan DPA bidang-bidang;
- 2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. Pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS
 - b. Pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPD atau RKAP/DPPA SKPD;
 - c. Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD maupun penjabaran APBDP;
 - d. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- e. Pengkoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- 3) Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai tugas yaitu:
- a. Merumuskan dan penyusunan kebijakan teknis penganggaran;
 - b. Membuat pedoman petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. Menyusun pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA/PPAS Perubahan;
 - d. Menyusun Rancangan APBD dan Perubahan Rancangan APBD;
 - e. Menyusun surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/RPSKPD dan PPKD;
- 4) Kepala Sub Bidang Anggaran I mempunyai fungsi:
- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis penganggaran;
 - b. Pembuat pedoman petunjuk teknis penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - c. Penyusunan pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA/PPAS perubahan;
 - d. Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - e. Penyusunan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA/RP-SKPD dan PPKD;
- 5) Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai tugas yaitu:
- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian dan pengesahan anggaran;
 - b. Menyusun pedoman pelaksanaan APBD/perubahan APBD;

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- c. Melakukan pengajuan rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - d. Meneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan DPAL;
 - e. Melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan APBD; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 6) Kepala Sub Bidang Anggaran II mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian dan pengesahan anggaran;
 - b. penyusunan pedoman pelaksanaan APBD/perubahan APBD;
 - c. pelaksanaan pengajuan rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - d. peneliti dan mengesahkan DPA-SKPD, DPPA-SKPD dan DPAL;
 - e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan APBD, dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 7) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengujian rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku;
 - b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

d. menyelenggarakan buku kas umum bendahara umum daerah dan buku

pembantu yang diper-

e. melaksanakan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban

Fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas

serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;

8) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengujian rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan berlaku;

b. pemantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;

c. penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;

d. penyelenggaraan buku kas umum bendahara umum daerah dan buku pembantu yang diperlukan;

e. pelaksanaan verifikasi terhadap laporan Surat Pertanggungjawaban Fungsional dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan rekening koran;

9) Kepala Bidang Akuntansi yaitu:

a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi daerah maupun akuntansi SKPD;

b. menyusun kebijakan akuntansi;

c. melakukan pengujian rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- d. melaksanakan restitusi/pengembalian pendapatan daerah;
- e. melaksanakan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



10) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi daerah maupun akuntansi SKPD;
- b. penyusunan kebijakan akuntansi;
- c. pelaksanaan pengujian rekening belanja atas SP2D yang telah terbit apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pelaksanaan restitusi/pengembalian pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

11) Kepala Sub Bidang Akuntansi I mempunyai tugas:

- a. melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan;
- b. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD terkait;
- c. menyiapkan laporan penerimaan secara periodik;
- d. melakukan koreksi jurnal penerimaan;
- e. menyiapkan laporan realisasi penerimaan APBD semesteran;

12) Kepala Sub Bidang Akuntansi I mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan;
- b. pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD terkait;
- c. menyiapkan laporan penerimaan secara periodik;
- d. pelaksanaan koreksi jurnal penerimaan;

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- e. penyiapan laporan realisasi penerimaan APBD semesteran;
- 13) Kepala Sub Bidang Akuntansi I mempunyai tugas:
- meneliti dokumen pengeluaran kas berdasarkan rekening koran;
 - melaksanakan verifikasi atas pengeluaran kas daerah;
 - melakukan restitusi/pengembalian pendapatan daerah;
 - meneliti Surat Pertanggungjawaban Fungsional dan dokumen kelengkapan SPP, SPM berdasarkan surat permintaan pembayaran dari SKPD;
 - mengkoordinasikan dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 14) Kepala Sub Bidang Akuntansi II mempunyai fungsi:
- peneliti dokumen pengeluaran kas berdasarkan rekening koran;
 - pelaksanaan verifikasi atas pengeluaran kas daerah;
 - pelaksanaan restitusi/pengembalian pendapatan daerah;
 - peneliti Surat Pertanggungjawaban Fungsional dan dokumen kelengkapan SPP, SPM berdasarkan surat permintaan pembayaran dari SKPD;
 - pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 15) Kepala Bidang Pengelolaan Aset yaitu:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- a. mengkoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. mengkoordinasikan penyusunan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum milik daerah;



16) Kepala Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. pengkoordinasian penyusunan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum milik daerah;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17) Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pencatatan Aset mempunyai tugas:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- a. melaksanakan pengadministrasian dan inventarisasi barang-barang milik daerah/aset daerah baik yang bergerak dan barang-barang yang tidak habis pakai;
- b. menyiapkan dan menyusun dokumen-dokumen yang terkait, penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang/ kekayaan milik daerah;
- c. menyusun dan mengkaji laporan barang/kekayaan milik daerah pada tingkat-tingkat intensitas pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menyusun dan menyediakan informasi/laporan mengenai kekayaan milik daerah;
- e. menyusun analisa standar biaya dan standar satuan harga;

18) Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pencatatan Aset mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengadministrasian dan inventarisasi barang-barang milik daerah/aset daerah baik yang bergerak dan barang-barang yang tidak habis pakai;
- b. penyiapan dan menyusun dokumen-dokumen yang terkait, penggunaan, penghapusan dan pemindahtanganan barang/ kekayaan milik daerah;
- c. penyusunan dan mengkaji laporan barang/kekayaan milik daerah pada tingkat-tingkat intensitas pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- d. penyusunan dan penyediaan informasi/laporan mengenai kekayaan milik daerah;
- e. penyusunan analisa biaya dan standar satuan harga;



4.1.4 Analisis Tingkat efektivitas Anggaran Belanja

Analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang. Efektivitas adalah kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan. Kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efektif >60% maka dinilai tidak efektif. jika rasio efektif antara 60%-79% maka dinilai kurang efektif, jika rasio efektif antara 80%-89% maka dinilai cukup efektif, jika rasio efektif antara 90%-100% maka dinilai efektif, jika rasio efektif > 100% maka dinilai sangat efektif. Semakin besar rasio efektifitas berarti kinerja pemerintah semakin baik. Pengukuran kinerja BPKAD Kabupaten Empat Lawang dalam pelaksanaan anggaran belanja tolak ukur yang digunakan adalah membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dikalikan 100%.

$$\text{efektifitas} = \frac{\text{Realisasi belanja induk}}{\text{Anggaran Belanja induk}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat dilakukan analisis tingkat efektifitas anggaran belanja dengan mengacu pada tabel Persentase Efektivitas Kinerja, yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Empat Lawang setiap tahunnya sebagai berikut:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Tabel 4. Realisasi Anggaran Belanja BPKAD tahun 2017 – 2021.

Tahun	Anggaran	Realisasi belanja
2017	14.465.340.704,44	11.995.922.715,00
2018	20.818.130.000,00	15.580.782.513,00
2019	22.726.540.000,00	16.561.816.626,00
2020	21.605.479.193,00	17.103.083.380,00
2021	15.388.540.839,82	11.227.292.887,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang

Berdasarkan tabel realisasi di atas, anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang baik yang sudah ditargetkan dan yang direalisasikan secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun terjadi penurunan ditahun 2020 yaitu target anggaran sebesar Rp.21.605.479.193,00 yang direalisasikan sebesar Rp.17.103.083.380,00 akan tetapi realisasi belanja terhadap anggaran mengalami penurunan hal ini menunjukkan kurang efektifnya belanja sehingga mempengaruhi pelaksanaan hasil kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a. Tahun 2017

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = \frac{11.995.922.715,00}{14.465.340.704,44} \times 100\%$$

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = 82,93\%$$

Pada Pada tahun 2017 rasio efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 82,93%, yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai cukup efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja, hal ini

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

berarti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017 menunjukkan kinerja

yang cukup maksimal.



b. Tahun 2018

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = \frac{20,818,130,406.36}{15,580,782,513.00} \times 100\%$$

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = 74,84\%$$

Pada Pada tahun 2018 rasio efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 74,84%, yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja, hal ini berarti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2018 menunjukkan kinerja yang belum maksimal.

c. Tahun 2019

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = \frac{22,726,542,341.72}{16,561,816,626.00} \times 100\%$$

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = 72,87\%$$

Pada Pada tahun 2019 rasio efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 72,87%, yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja, hal ini

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

berarti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2019 menunjukkan kinerja

yang belum maksimal.



d. Tahun 2020

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = \frac{21,605,479,193.00}{17,103,083,380.00} \times 100\%$$

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = 79,16\%$$

Pada Pada tahun 2020 rasio efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 79,16%, yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja, hal ini berarti kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang belum maksimal.

e. Tahun 2021

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = \frac{15.380.540.839,82}{11.227.292.887,00} \times 100\%$$

$$\text{efektifitas anggaran belanja} = 72,96\%$$

Pada tahun 2021 rasio efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 72,96%, yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai kurang efektif dalam pelaksanaan anggaran belanja, hal ini berarti

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Empat Lawang tahun 2021 menunjukkan kinerja yang

belum maksimal



4.1.5 Analisis Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Tabel dibawah ini akan menunjukkan jumlah realisasi belanja langsung dan total realisasi belanja BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Total Realisasi Anggaran Belanja BPKAD 2017 – 2021.

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Anggaran Belanja Langsung (Rp)
2017	5,336,635,904.00	5,460,000,000.00
2018	8,236,385,275.00	8,500,000,000.00
2019	7,144,179,065.00	7,271,792,000.00
2020	10,183,666,228.00	14,010,071,570.00
2021	2,144,931,338.00	2,655,131,489.00

Sumber : Laporan APBD BPKAD Kab. Empat Lawang

Dari tabel diatas, akan dihitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja langsung}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, Mengenai kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan melebihi 100%, maka anggaran belanja TIDAK EFISIEN.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan KURANG EFISIEN.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan CUKUP EFISIEN.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan EFISIEN.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan SANGAT EFISIEN.

a. Tahun 2017

$$\text{efisiensi anggaran belanja} = \frac{5.336.635.904,00}{5.460.000.000,00} \times 100\%$$

$$\text{efisiensi anggaran belanja} = 97,74\%$$

Pada tahun 2017 rasio efisiensi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 97,74% dimana nilai ini 90% - 100% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai kurang efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja

b. Tahun 2018

$$\text{efisiensi anggaran belanja} = \frac{8.236.385.275,00}{8.500.000.000,00} \times 100\%$$

$$\text{efisiensi anggaran belanja} = 96,90\%$$

Pada tahun 2018 rasio efisiensi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 96,90% dimana nilai ini 90% - 100% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai kurang efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja

c. Tahun 2019

$$\text{efisiensi anggaran belanja} = \frac{7.144.179.065,00}{7.271.792.000,00} \times 100\%$$

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

efisiensi anggaran belanja = 98.25%

Pada tahun 2019 rasio efisiensi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 98,25% dimana nilai ini 90% - 100% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai kurang efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja

d. Tahun 2020

$$\text{efisiensi anggaran belanja} = \frac{10.183.666.228,00}{14.010.071.570,00} \times 100\%$$

efisiensi anggaran belanja = 72.69%

Pada tahun 2020 rasio efisiensi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 72,69% dimana nilai ini 60% - 80% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja

e. Tahun 2021

$$\text{efisiensi anggaran belanja} = \frac{2.144.931.338,00}{2.655.131.489,00} \times 100\%$$

efisiensi anggaran belanja = 80,78%

Pada tahun 2021 rasio efisiensi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang adalah 80,78% dimana nilai ini 80% - 90% yang artinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang dinilai cukup efisien dalam pelaksanaan anggaran belanja

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.1.6 Analisis Tingkat Kemandirian

Tabel dibawah ini akan menunjukkan jumlah Anggaran Belanja dan Total Belanja langsung/modal Kabupaten Empat Lawang



Tabel 6. Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan pusat/provinsi BPKAD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 – 2021

Tahun	PAD (Rp)	Bantuan pusat (Rp)
2017	76.023.472.066.00	728.624.943.876.00
2018	59.155.894.402.00	774.007.692.642.00
2019	53.374.812.218.00	772.222.278.993.00
2020	48.582.630.532.00	715.588.302.583.00
2021	99.240.890.484.00	836.555.544.709.00

Sumber : Laporan APBD BPKAD Kab. Empat Lawang

Dari tabel diatas, akan dihitung tingkat kemandirian dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat atau Provinsi}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, Mengenai kriteria tingkat rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil pencapaian antara 0% - 25%, maka kemandirian dikatakan **RENDAH SEKALI**
2. Jika hasil pencapaian antara 25% - 50%, maka kemandirian dikatakan **RENDAH.**
3. Jika hasil pencapaian antara 50% - 75%, maka kemandirian dikatakan **SEDANG.**

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4. Jika hasil pencapaian antara 75% - 100%, maka kemandirian dikatakan TINGGI.



- a. Tahun 2017

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{76.023.472.066.00}{728.624.943.876.00} \times 100\%$$

$$\text{kemandirian} = 10,43\%$$

Pada tahun 2017 rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah 10,43% dimana nilai ini antara 0% - 25% yang artinya BPKAD Kabupaten Empat Lawang dinilai rendah sekali dalam kemandirian atau berpola instruktif.

- b. Tahun 2018

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{59.155.894.402.00}{774.007.692.642.00} \times 100\%$$

$$\text{kemandirian} = 7,64\%$$

Pada tahun 2018 rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah 7,64% dimana nilai ini antara 0% - 25% yang artinya BPKAD Kabupaten Empat Lawang dinilai rendah sekali dalam kemandirian atau berpola instruktif.

- c. Tahun 2019

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{53.374.812.218.00}{772.222.278.993.00} \times 100\%$$

$$\text{kemandirian} = 6,91\%$$

Pada tahun 2019 rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah 6,91% dimana nilai ini antara 0% - 25% yang artinya BPKAD Kabupaten Empat Lawang dinilai rendah sekali dalam kemandirian atau berpola instruktif.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

d. Tahun 2020

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{48.582.630.532.00}{715.588.302.583.00} \times 100\%$$

kemandirian = 6,78%

Pada tahun 2020 rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah 6,78% dimana nilai ini antara 0% - 25% yang artinya BPKAD Kabupaten Empat Lawang dinilai rendah sekali dalam kemandirian atau berpola instruktif.

e. Tahun 2021

$$\text{rasio kemandirian} = \frac{99.240.890.484.00}{836.555.544.709.00} \times 100\%$$

$$\text{rasio kemandirian} = 11,86\%$$

Pada tahun 2021 rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah 11.86% dimana nilai ini antara 0% - 25% yang artinya BPKAD Kabupaten Empat Lawang dinilai rendah sekali dalam kemandirian atau berpola instruktif.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.1.7 Analisis Tingkat Pertumbuhan

Tabel dibawah ini akan menunjukkan pendapatan Realisasi Anggaran Tahun sekarang dengan Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Belanja Tahun sekarang dan Realisasi Anggaran Tahun sebelumnya BPKAD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 – 2021

Tahun	Realisasi PAD t (Rp)	Realisasi PAD t-1 (Rp)
2017	68.804.306.038.58	54.350.104.539.00
2018	32.217.492.488.71	68.804.306.038.58
2019	41.672.141.481.16	32.217.492.488.71
2020	33.740.140.731.07	41.672.141.481.16
2021	55.693.918.472.60	33.740.140.731.07

Sumber : Laporan APBD BPKAD Kab. Empat Lawang

Dari tabel diatas, akan dihitung tingkat rasio pertumbuhan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio pertumbuhan} = \frac{RpX_n - RpX_{n-1}}{RpX_{n-1}} \times 100\%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, Mengenai kriteria tingkat pertumbuhan adalah sebagai berikut :

1. Jika hasil pencapaian antara 0% - 25%, maka pertumbuhan dikatakan RENDAH.
2. Jika hasil pencapaian antara 25% - 50%, maka pertumbuhan dikatakan SEDANG.
3. Jika hasil pencapaian antara 50% - 100%, maka pertumbuhan dikatakan TINGGI.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

a. Tahun 2017

$$\begin{aligned} \text{rasio pertumbuhan} &= \frac{68.804.306.038.58 - 54.350.104.539.00}{54.350.104.539.00} \times 100\% \\ &= \frac{14.454.201.509.58}{54.350.104.539.00} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan} = 26,59\%$$

Pada tahun 2017 rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah 26,59% dimana nilai ini antara 25% - 50% yang artinya dinilai sedang dalam pertumbuhan BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

b. Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{rasio pertumbuhan} &= \frac{32.217.492.488.71 - 68.804.306.038.58}{68.804.306.038.58} \times 100\% \\ &= \frac{-36.586.813.549.87}{68.804.306.038.58} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan} = -53,71\%$$

Pada tahun 2018 rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah -53,71% dimana nilai ini artinya rendah sekali dalam pertumbuhan BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

c. Tahun 2019

$$\begin{aligned} \text{rasio pertumbuhan} &= \frac{41.672.141.481.16 - 32.217.492.488.71}{32.217.492.488.71} \times 100\% \\ &= \frac{9.454.648.992.45}{32.217.492.488.71} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan} = 29,34\%$$

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Pada tahun 2019 rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat

Lawang adalah 29,34% dimana nilai ini antara 25% - 50% yang artinya dinilai sedang dalam pertumbuhan BPKAD Kabupaten Empat Lawang.



d. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{rasio pertumbuhan} &= \frac{33.740.140.731.07 - 41.672.141.481.16}{41.672.141.481.16} \times 100\% \\ &= \frac{-7.932.000.750.09}{41.672.141.481.16} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan} = -19,03\%$$

Pada tahun 2020 rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah -19,03% dimana nilai ini artinya rendah sekali dalam pertumbuhan BPKAD Kabupaten Empat Lawang

e. Tahun 2021

$$\begin{aligned} \text{rasio pertumbuhan} &= \frac{55.693.918.472.60 - 33.740.140.731.07}{33.740.140.731.07} \times 100\% \\ &= \frac{21.953.777.741.53}{33.740.140.731.07} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio pertumbuhan} = 65,06\%$$

Pada tahun 2021 rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang adalah 65,06% dimana nilai ini antara 50% - 100% yang artinya dinilai tinggi dalam pertumbuhan BPKAD Kabupaten Empat Lawang.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.2. Pembahasan

4.2.1. Efektivitas Anggaran Belanja

Berikut disajikan gambar yang menggambarkan tingkat efektivitas anggaran belanja dari tahun 2017 – 2021 pada BPKAD

Tabel 8. Tingkat Efektivitas BPKAD 2017 – 2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Efektifitas (%)	Kriteria
2017	14,465,340,704.44	11,995,922,715.00	82.93	Cukup Efektif
2018	20,818,130,406.36	15,580,782,513.00	74.84	Kurang Efektif
2019	22,726,542,341.72	16,561,816,626.00	72.87	Kurang Efektif
2020	21,605,479,193.00	17,103,083,380.00	79.16	Kurang Efektif
2021	15,388,540,839.82	11,227,292,887.80	72,96	Kurang Efektif

Sumber : Data diolah (2022)

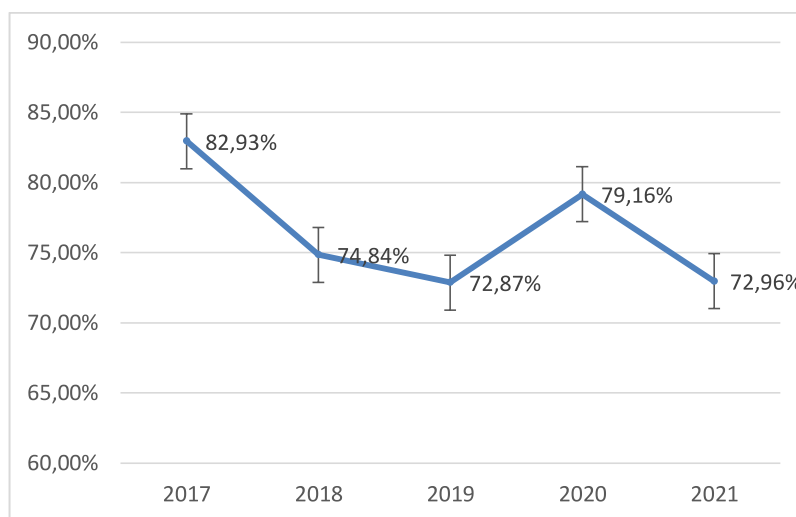
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat selama periode anggaran tahun 2017-2021, tingkat efektivitas anggaran belanja tidak tetap dari tahun ke tahun, dari yang cukup efektif sampai mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2021 menjadi kurang efektif. Pada tahun 2017 efektivitasnya yaitu 82,93% masuk dikategorikan cukup efektif, pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya menurun yaitu 74,84% dimana dikategorikan tidak efektif begitu juga ditahun 2019 sedikit menurun yaitu 72,87 %, pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan menjadi 79,16% dan ditahun 2021 sedikit menurun yaitu 72,96% namun masih tetap tidak efektif.

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Kaupaten Empat Lawang dikatakan tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya masih dibawah 100% yaitu sebesar 75,76%. Adapun faktor yang menyebabkan kinerja keuangan BPKAD tidak efektif karena pendapatan daerah

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

masih dibawah dari yang dianggarkan sebelumnya. Dengan menurunnya rasio ini juga menunjukkan BPKAD Kabupaten Empat Lawang memiliki kinerja keuangan yang kurang efektif dalam mengelola pendapatan daerah. Hal ini disebabkan rendahnya penerimaan yang dihasilkan dari pendapatan dan belanja tidak maksimal. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar 3 dibawah ini:



Gambar 4.1 Grafik rasio efektifitas BPKAD tahun 2017 – 2021

Berdasarkan grafik diatas, bahwa secara keseluruhan dari tahun 2017 – 2021, tingkat efektivitas anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 mencapai tingkat cukup efektif, Namun pada tahun 2018 – 2021 tingkat efektivitas nya berada pada Kurang efektif. Rasio efektifitas ini masih sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, masih mengalami fluktuasi atau naik turunnya persentase, hal ini dikarenakan masih rendahnya pendapatan yang dihasilkan dan belanja yang tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark) 4.2.2. Efisiensi Anggaran Belanja BPKAD

Dibawah ini akan ditunjukkan tabel tingkat efisiensi anggaran belanja BPKAD tahun 2017 – 2021.

Tabel 9. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran BPKAD tahun 2017 – 2021

Tahun	Realisasi Belanja Langsung (Rp)	Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2017	5,336,635,904.00	5,460,000,000.00	97.74	Kurang Efisien
2018	8,236,385,275.00	8,500,000,000.00	96.90	Kurang Efisien
2019	7,144,179,065.00	7,271,792,000.00	98.25	Kurang Efisien
2020	10,183,666,228.00	14,010,071,570.00	72.69	Efisien
2021	2,144,931,338.00	2,665,131,489.00	80,78	Cukup Efisien

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat efisiensi dari anggaran belanja yang ada di BPKAD yang tidak tetap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tingkat efisiensi sebesar 97,74% selanjutnya pada tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 96,90%. Dari sudut pandang tingkat efisiensi ini dipandang sebagai penurunan tingkat efisiensi tetapi masih termasuk dalam kriteria kurang efisien karena masih direntang 90% - 100%. Begitu pula Pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan tingkat efisien sebesar 98.26% nilai ini masih masuk dalam kategori kurang efisien. Ini menandakan bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia sehingga pengeluaran belanja tersebut dibiayai dengan pinjaman/hutang. Hal ini menyangkut perbandingan output dan input pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Output yang terlampau besar dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan dimana nilai rasio sebesar 72,69% dan sudah masuk kategori efisien karena masih direntang 60% - 80% dan tahun

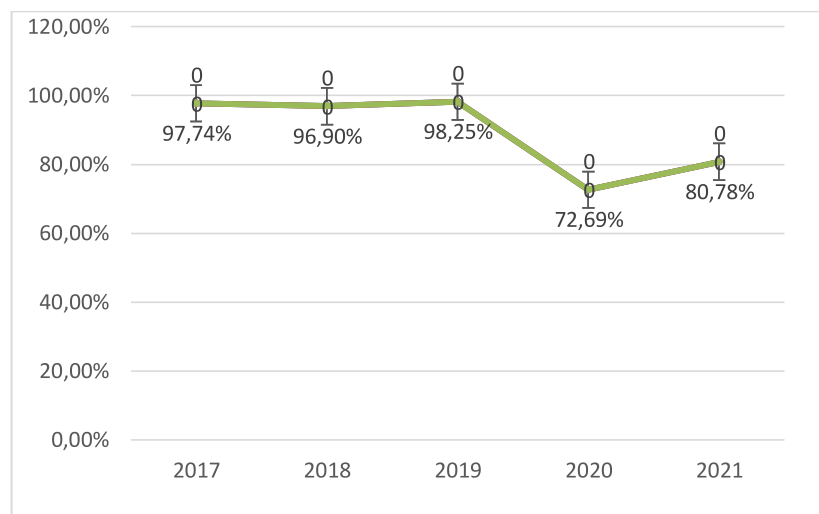
Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2021 sedikit mengalami penurunan dimana nilai rasio sebesar 80,78% dan sudah masuk kategori cukup efisien.



Rasio Efisiensi anggaran belanja diketahui bahwa rata-rata efisiensi Kabupaten Empat Lawang tahun 2017-2021 sebesar 88,68% atau dapat dikatakan cukup efisien. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dalam hal ini tergolong baik karena dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.



Gambar 4.2 Grafik rasio efisiensi BPKAD tahun 2017-2021

Berdasarkan data grafik di atas, bahwa dapat kita lihat rasio efisiensi BPKAD mengalami penurunan persentase. Pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa kinerja rasio efisiensi BPKAD mengalami peningkatan efisiensi dari kurang efisien menjadi efisien, tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dari efisien menjadi cukup efisien.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Ika Nurhayati Putri, 2018 dalam mengelola PAD maka meningkat, kedepannya pemerintah daerah atau terlebih khusus BPKAD Kabupaten Empat Lawang agar dapat mempertahankan tingkat efisiensi laporan relisasi anggaran dengan meningkatkan terus pengawasan, pelayanan, dan koordinasi pemerintah agar supaya realisasi pendapatan asli daerah lebih maksimal.

4.2.3. Kemandirian Kinerja Keuangan BPKAD

Dibawah ini akan menunjukkan tabel tingkat kemandirian Kinerja Keuangan pada BPKAD tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 10. Tingkat Kemandirian Kinerja Keuangan BPKAD tahun 2017 – 2021

Tahun	PAD (Rp)	Bantuan Pusat (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)	Kriteria
2017	76.023.472.066.00	728.624.943.876.00	10,43	Rendah Sekali
2018	59.155.894.402.00	774.007.692.642.00	7,64	Rendah Sekali
2019	53.374.812.218.00	772.222.278.993.00	6,91	Rendah Sekali
2020	48.582.630.532.00	715.588.302.583.00	6,78	Rendah Sekali
2021	99.240.890.484.00	836.555.544.709.00	11,86	Rendah Sekali

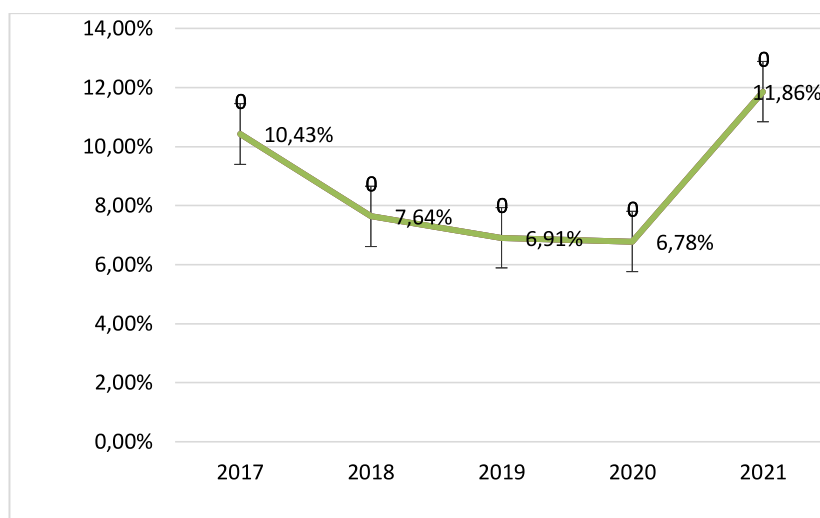
Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan tabel data diatas, menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang yang tidak tetap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 tingkat kemandirian sebesar 10,43% selanjutnya pada tahun 2018 tingkat kemandirian mengalami penurunan sebesar 7,64%, Begitu pula Pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan lagi tingkat kemandirian menjadi sebesar 6,91% selanjutnya pada tahun 2020 dimana nilai rasio sebesar 6,78% nilai ini masih masuk dalam kategori rendah sekali dan tahun 2021 sedikit terjadi peningkatan dimana nilai rasio sebesar 11,86% tetapi masih masuk dalam kriteria

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

rendah sekali kemandirian BPKAD Kabupaten Empat Lawang. Masih rendahnya tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Empat Lawang karena sumber pendatan daerah masih bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. Untuk lebih jelas bisa dilihat dari gambar 6 dibawah ini.



Gambar 4.3 Grafik rasio kemandirian BPKAD tahun 2017-2021

Berdasarkan data grafik di atas, bahwa dapat kita lihat rasio kemandirian BPKAD Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan persentase. Dimulai pada tahun 2017 mengalami penurunan, pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan tetapi masih dalam kategori rendah sekali dalam kemandiriannya.

Rasio ini dengan penelitian relevan atau penelitian sebelumnya welio wanda, 2016 masih sama yaitu pemerintah rendah sekali dalam kemandiriannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan pada beberapa daerah, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dalam pembangunan daerah, ataupun terbatasnya informasi tentang potensi pendapatan daerah yang ada.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.2.4. Pertumbuhan Kinerja Keuangan BPKAD

Dibawah ini akan disajikan tabel tingkat Pertumbuhan Kinerja Keuangan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

Tabel 11. Tingkat pertumbuhan Kinerja Keuangan BPKAD Tahun 2017 – 2021

Tahun	Realisasi PAD t (Rp)	Realisasi PAD t-1 (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Kriteria
2017	68.804.306.038.58	54.350.104.539.00	26,59	Sedang
2018	32.217.492.488.71	68.804.306.038.58	-53,17	Rendah
2019	41.672.141.481.16	32.217.492.488.71	29,34	Sedang
2020	33.740.140.731.07	41.672.141.481.16	-19,03	Rendah
2021	55.693.918.472.60	33.740.140.731.07	65,06	Tinggi

Sumber : Data diolah (2022)

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Empat Lawang mengalami fluktuasi. Dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -53,17% dari tahun sebelumnya, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 29,34%, mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar -19,03%. Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 65,06%. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang harus selalu meningkatkan PADnya dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak perlu tergantung pada bantuan pemerintah pusat agar mandiri mengolah daerahnya dengan PAD yang tinggi.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

Untuk lebih jelas bisa dilihat gambar dibawah ini.



Gambar 4.4 Grafik rasio pertumbuhan BPKAD dari tahun 2017-2021

Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat rasio pertumbuhan BPKAD Kabupaten Empat Lawang mengalami fluktuasi persentase. Dimulai pada tahun 2018 Yang menunjukkan bahwa kinerja rasio pertumbuhan BPKAD Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan yang sangat jauh dibawah 0, yang artinya BPKAD sangat jauh sekali dalam pertumbuhan, hal itu disebabkan karena PAD daerah yang sangat sedikit, tetapi realisasi belanja yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2020 mengalami penurunan kembali dan tahun 2021 mengaalmi peningkatan yang masuk dalam kriteria tinggi atau positif. Penelitian ini masih sama dengan penelitian sebelumnya dimana rasio pertumbuhan juga mengalami fluktuasi. Tentunya pemerintah harus memperhatikan lagi setiap aspeknya agar tidak terjadi fluktuasi, sehingga rasio pertumbuhan menjadi lebih baik kedepanny

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
BAB V



5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan anggaran belanja di BPKAD Kabupaten Empat Lawang memiliki kriteria efektivitas yang bervariasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas dari anggaran belanja BPKAD Kabupaten Empat Lawang berada dalam kriteria yang cukup efektif. Dan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 tingkat efektivitas turun dalam kriteria kurang efektif. Naik turunnya tingkat efektivitas anggaran belanja disebabkan karena realisasi anggaran yang dicapai tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Walaupun ada program yang terealisasi tapi tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan tetapi kegiatan lain yang telah di anggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
2. Tingkat atau kriteria efisiensi BPKAD Kabupaten Empat Lawang tahun 2017 -2021, secara keseluruhan sudah mengalami peningkatan yang baik, dimana pada tahun 2017 tingkat efisiensi 97,74%, dan tahun 2018 tingkat efisiensi 96,90%, tahun 2019 tingkat efisiensi 98,25% dan tahun 2020 tingkat efisiensi 72,69%. jadi anggaran belanja pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang sudah memiliki kriteria yang efisien pada tahun 2021, karena tingkat efisiensi semua berada dikisaran 60% - 80%. Pengelolaan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Walaupun empat tahun terakhir ini anggaran masih kurang efisien.

3. Kemandirian Pemerintah BPKAD Kabupaten Empat Lawang dalam memenuhi dana untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat masih sangat rendah, sehingga termasuk kedalam pola instruktif yakni peran Pemerintah Pusat lebih dominan dibandingkan tingkat kemandirian pemerintah daerah.
4. Rasio pertumbuhan BPKAD Kabupaten Empat Lawang mengalami fluktuasi dilihat dari perhitungan rasio pertumbuhan PAD dan rasio pertumbuhan pendapatan, hal ini dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima Kabupaten Empat Lawang setiap tahunnya.

5.2 Saran

1. Dalam rangka menghadapi otonomi daerah khususnya mempersiapkan sumber daya manusia, Untuk instansi tempat dilakukannya penelitian yaitu BPKAD Kabupaten Empat Lawang agar lebih meningkatkan tingkat efektifitas pada tahun yang akan datang dengan melakukan perencanaan untuk memenuhi target anggaran yang akan ditetapkan guna tercapainya kriteria yang sangat efektif dan sebaiknya anggaran yang ditargetkan untuk suatu program dapat dilaksanakan agar tingkat efektivitasnya bisa mencapai target.
2. Tingkat efisien untuk BPKAD Kabupaten Empat Lawang agar tetap mempertahankan tingkat efisiennya yang dimana disetiap tahun

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mengalami perubahan yang cukup baik dimana tingkat efisien pada tahun sebelumnya masuk da... teria kurang efisien namun mengalami peningkatan pada tahun... tingkat efisien tetapi sedikit mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 ke tingkat cukup efisien.

3. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang diharapkan dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dengan melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kabupaten Empat Lawang juga harus tidak mengandalkan bantuan pemerintah pusat, agar kedepannya tumbuh menjadi Kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.
4. Dalam perhitungan rasio pertumbuhan yang mengalami fluktuasi, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan setiap aspeknya agar Kabupaten Empat Lawang dapat mempertahankan tingkat rasio pertumbuhannya agar tidak mengalami fluktuasi.

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. (2003). *Pengertian dan Fungsi Akuntansi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andira, A. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Beni, P. (2016). *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Jayapura: Taushia.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haruman, T. (2010). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23–33.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- LKjIP BPKAD. (2020). *Laporan Inerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*. Yogyakarta: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Publik (Kedua)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014. *Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut*.
- Putri, I. N. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna* (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten). Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19500>
- Rahardjo, A. (2011). *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Tanjung, A. H. (2006). *Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003. *Tentang Keuangan Negara*.
- Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintahan Daerah*.
- Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Jurnal EMBA*, 4(3), 192–200.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 187–195. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

